

## Akuntansi, Budaya, dan Korupsi: Sebuah Studi antar Negara

**Ahmad Dzakwan**

Universitas Hasanuddin Makassar  
*ahmaddzkwn@gmail.com*

**Syarifuddin**

Universitas Hasanuddin Makassar  
*syarif1963@yahoo.com*

**Amiruddin**

Universitas Hasanuddin Makassar  
*amiruddinj64@gmail.com*

### *Abstract*

*The purpose of this study is to determine and analyze the influence of accounting and culture on the level of corruption in countries. The study uses the adoption status of international accounting standards as a proxy for the accounting variable, Hofstede's cultural dimensions for culture variable, and measures a country's level of corruption using the Corruption Perception Index. The research data are obtained from adoption status of international accounting standards published by IFAC and IASB, Hofstede's cultural dimensions published by Hofstede Insights, and Corruption Perceptions Index published by Transparency International for the observation period of 2022-2023. The study employs multiple linear regression analysis of the data with a sample size of 83 countries obtained using purposive sampling. The results show that a country can reduce its level of corruption by adopting international public sector accounting standards and international financial reporting standards. The study also indicates that a country's level of corruption increases if the country is characterized by high power distance, collectivism, masculinity, high uncertainty avoidance, long-term orientation, and restraint cultural dimensions. Meanwhile, adoption of international education standards, international standards on auditing, and code of ethics for professional accountants has no significant influence on reducing a country's level of corruption.*

**Keywords** *Corruption Perception Index, Cultural Dimension, International Accounting Standards*

### **A. PENDAHULUAN**

Selama 30 tahun terakhir, korupsi menjadi masalah global serius yang mempengaruhi negara-negara di seluruh dunia. Korupsi dianggap menyebabkan kemiskinan, ketidakadilan, menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi investasi sektor pendidikan dan kesehatan suatu negara (Gupta dkk., 2002; Mauro, 1996; dan Tanzi, 1998). Studi terbaru terkait korupsi menunjukkan bahwa sebagian besar negara gagal menghentikan korupsi selama dekade terakhir. Dimana 124 negara mengalami tingkat korupsi yang stagnan, sementara jumlah negara yang mengalami penurunan semakin meningkat (Transparency International, 2022) dan diperkirakan menyebabkan perusahaan kehilangan 5 persen pendapatan setiap

tahun dan menyebabkan kerugian total lebih dari US\$3,6 miliar terhadap ekonomi global pada tahun 2022 (ACFE, 2022).

Sehubungan dengan dampak dari suatu tindakan korupsi, mendorong sejumlah peneliti untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana korupsi dapat terjadi. Penelitian Jensen & Meckling (1976) dan Eisenhardt (1989) menganalisis sebuah tindakan korupsi melalui sebuah model hubungan prinsipal-agen (P-A) yang menggambarkan hubungan antara seorang prinsipal yang mempekerjakan agen untuk bertindak atas nama dan kepentingan mereka. Melalui model ini sebuah tindakan korupsi dilihat dapat terjadi ketika terdapat kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*) yang menempatkan agen memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pihak prinsipal dan berdasarkan asumsi bahwa setiap individu cenderung bertindak memaksimalkan kepentingan diri sendiri, kondisi asimetri informasi dapat mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui prinsipal dan memungkinkan aktivitas kepentingan pribadi agen yang bertentangan dengan kepentingan prinsipal (*agency problem*) dapat terjadi dan sulit dideteksi. Adapun penelitian Cressey (1950) menjelaskan tindakan korupsi melalui model yang dikenal sebagai *fraud triangle theory*. Model tersebut menjelaskan sebuah tindakan korupsi terjadi tidak terlepas dari terdapatnya beberapa faktor seperti tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*) yang memotivasi dan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan korupsi.

Selain penelitian menganalisis dan menjelaskan bagaimana korupsi dapat terjadi, sejumlah penelitian lainnya berusaha memberikan bukti empiris terkait penyebab atau determinan apa yang dapat memengaruhi suatu korupsi. Sejumlah penelitian diantaranya menemukan bahwa akuntansi dan budaya dapat mempengaruhi tingkat korupsi suatu negara. Penelitian terkait pengaruh akuntansi terhadap korupsi menjelaskan akuntansi yang berfokus pada efisiensi, kontrol, dan pengungkapan memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam mengurangi dan mencegah korupsi (Everett dkk., 2007; dan Shleifer & Vishny, 1993). Dalam perspektif *fraud triangle*, penggunaan akuntansi dapat membantu mengurangi faktor *opportunity* yang mendorong seseorang untuk melakukan korupsi dengan meningkatkan kontrol internal dan efektivitas audit (Cressey, 1986). Dalam perspektif teori agensi, akuntansi melalui standar akuntansi dan audit dapat membantu mengatasi masalah prinsipal-agen dan asimetri informasi yang dapat menyebabkan tindakan korupsi. Praktik akuntansi yang lebih baik juga dapat memecahkan masalah asimetri informasi dan membuat informasi keuangan menjadi lebih

transparan, sehingga mempersulit manajer organisasi untuk bertindak bertentangan dengan harapan pemegang saham (Malagueño dkk., 2010 dan Wu, 2005).

Dalam mengukur akuntansi suatu negara sejumlah studi menggunakan tingkat adopsi standar akuntansi internasional sebagai proksi. Pengadopsian standar akuntansi internasional oleh suatu negara dinilai dapat mengurangi dan mencegah korupsi dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, mengurangi asimetri informasi, dan memastikan praktik berkualitas tinggi oleh akuntan (Chen dkk., 2010; Ghaffoori, 2016; Sutcliffe, 2003; dan Wu, 2005). Penelitian Houqe & Monem (2016) menemukan bahwa pengadopsian IFRS dan tingkat pengungkapan dapat mengurangi tingkat korupsi di negara maju dan berkembang. Tawiah (2021) menemukan pengadopsian IPSAS, IFRS, dan ISA berpengaruh negatif terhadap korupsi. Atuilik (2016) menemukan bahwa pengadopsian IPSAS tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi di negara maju, tetapi berpengaruh di negara berkembang. Keskin & Işık (2015) menemukan bahwa negara yang sangat korup memiliki kemungkinan kecil untuk mengadopsi kode etik IFAC jika dibandingkan dengan negara yang bersih. Albrecht dkk. (2012) menemukan bahwa penerapan syarat kompetensi formal atau informal bagi profesi akuntan dan auditor berpengaruh negatif terhadap tingkat persepsi korupsi pada suatu negara. Meskipun telah terdapat sejumlah penelitian yang berusaha membahas dan memberikan bukti empiris untuk mendukung pengaruh akuntansi yang diproksikan dengan pengadopsian standar akuntansi internasional terhadap korupsi, masih terdapat sedikit penelitian yang menguji dan memberikan bukti empiris terkait pengadopsian beberapa standar internasional seperti *International Standards on Auditing*, *Code of Ethics for Professional Accountants*, dan *International Education Standards*. Berdasarkan pertimbangan standar tersebut juga dikeluarkan dan bagian tidak terpisahkan dalam rangka memastikan kinerja berkualitas tinggi oleh profesi akuntan. Maka peneliti menganggap kurangnya bukti empiris untuk mendukung hubungan akuntansi-korupsi menjadi kesenjangan terbesar dalam literatur yang ada.

Adapun penelitian yang meneliti pengaruh budaya terhadap korupsi, sejumlah penelitian menjelaskan bahwa alasan seseorang untuk melakukan kecurangan atau korupsi tidak bisa dilepaskan sepenuhnya dari konteks sosial pelakunya, di mana suatu budaya dalam masyarakat dinilai dapat memengaruhi kecenderungan/keputusan seseorang untuk melakukan/tidak melakukan suatu tindakan korupsi atau menoleransi suatu tindakan korupsi (Amalia & Handayani, 2019 dan Mihret, 2014). Dalam perspektif *fraud triangle*, penggunaan budaya dinilai dapat menjadi tambahan dalam menjelaskan faktor-faktor pendorong yang memotivasi seseorang untuk melakukan suatu tindakan fraud atau kecurangan (Cressey,

1986; Davis & Pesch, 2013; dan Mihret, 2014). Sedangkan dalam perspektif teori agensi, suatu budaya tertentu dinilai dapat memengaruhi hubungan yang terjadi antara prinsipal dan agen di mana suatu budaya mungkin dapat menyebabkan asimetri informasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan budaya yang lain. (Ekanayake, 2004; Farooq dkk., 2020; dan Wiseman dkk., 2012). Dalam mengukur budaya suatu negara, model Hofstede yang menggunakan enam dimensi budaya *Power Distance* (PD), *Individualism* (IDV), *Masculinity* (MAS), *Uncertainty Avoidance* (UA), *Long-Term Orientation* (LTO), dan *Indulgence* (IVR) telah diterima secara luas oleh kalangan peneliti dan praktisi sebagai sebuah model universal untuk mengukur budaya suatu negara. Meskipun demikian masih terdapat perbedaan diantara peneliti terkait pengaruh dimensi budaya tersebut terhadap korupsi.

Untuk budaya PD penelitian yang dilakukan Mihret (2014) menemukan bahwa negara dengan budaya PD tinggi memiliki risiko lebih tinggi terhadap fraud, sementara Achim (2016) menemukan nilai tinggi pada budaya PD terkait dengan tingkat korupsi yang tinggi. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Kimbro (2002) menunjukkan bahwa negara yang korup dicirikan memiliki PD rendah, dan Seleim & Bontis (2009) menemukan bahwa budaya PD tidak berpengaruh terhadap korupsi. Untuk budaya IDV hasil penelitian Achim (2016) dan Boateng dkk. (2021) menunjukkan hasil IDV berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Namun hasil berbeda ditemukan oleh Mihret (2014) menemukan dimensi IDV tidak berpengaruh terhadap risiko fraud. Lebih lanjut untuk budaya MAS, penelitian Yeganeh (2014) dan Husted (1999) menemukan dimensi budaya MAS berpengaruh positif dan identik dengan perilaku korupsi. Sedangkan hasil berbeda diperoleh Mihret (2014) yang menemukan budaya MAS tidak berpengaruh terhadap risiko *fraud*. Adapun untuk budaya UA, Yeganeh (2014) menemukan dimensi budaya UA berpengaruh positif dan identik dengan perilaku korupsi. Sedangkan hasil berbeda diperoleh Yamen dkk. (2019) yang menemukan UA berpengaruh negatif terhadap *financial crime* dan Boateng dkk. (2021) menemukan UA tidak berpengaruh terhadap korupsi. Untuk budaya LTO penelitian Mihret (2014) dan Yamen dkk. (2019) menemukan LTO berhubungan negatif dengan risiko fraud. Sedangkan penelitian yang dilakukan Boateng dkk. (2021) menemukan hasil berbeda di mana dimensi LTO ditemukan tidak berpengaruh terhadap korupsi. Untuk budaya terakhir yaitu IVR penelitian Boateng dkk. (2021) dan Zuzana & Duzan (2018) menemukan budaya IVR berpengaruh negatif terhadap korupsi. Sedangkan penelitian yang dilakukan Yamen dkk. (2019) menemukan hasil berbeda di mana dimensi IVR tidak berpengaruh terhadap kejahatan keuangan.

Berdasarkan data yang menunjukkan tingginya fenomena kasus korupsi bersamaan dengan terjadinya stagnasi indeks korupsi selama satu dekade terakhir yang menyebabkan kerugian yang besar terhadap perekonomian global dan terdapatnya *research gap* pada penelitian yang telah dipaparkan, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai pengaruh akuntansi dan budaya terhadap korupsi. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Mihret (2014) yang berjudul “*National Culture and Fraud Risk : Exploratory Evidence*” dan penelitian Atuilik (2016) yang berjudul “*The Relationship Between the Adoption of International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) by Governments and Perceived Level of Corruption*”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian tersebut yaitu penelitian ini menggunakan *Corruption Perception Index* sebagai variabel dependen. Sedangkan kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan variabel independen, dimana penelitian ini mengkombinasikan keseluruhan variabel-variabel budaya Hofstede dalam penelitian Amalia & Handayani (2019) yang terdiri dari *Power Distance, Individualism, Masculinity, Uncertainty Avoidance, Long-Term Orientation, dan Indulgence* untuk mengukur budaya suatu negara dengan variabel pengadopsian *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)* yang terdapat dalam penelitian Atuilik (2016) dan menambahkan pengadopsian *International Education Standard, Code of Ethics for Professional Accountants, International Standards on Auditing, dan International Financial Reporting Standards* untuk mengukur akuntansi suatu negara sebagai variabel independen.

### **Perumusan Hipotesis**

*International Education Standards (IES)* adalah standar yang dikembangkan dan dikeluarkan oleh IFAC yang memberikan kerangka kerja komprehensif berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan akuntan profesional. Tujuan IES adalah memastikan bahwa akuntan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka secara efektif dan etis. Berdasarkan pertimbangan kurangnya pendidikan profesional dapat berkontribusi pada kegagalan etis dan intelektual dalam profesi akuntansi Gray dkk. (1994) IES dapat berfungsi sebagai alat untuk mengurangi potensi kegagalan semacam itu dengan memberikan kerangka kerja standar untuk pendidikan dan pelatihan akuntan profesional. IES yang mensyaratkan studi akademis, pengalaman praktis, dan ujian lisensi dapat memastikan bahwa akuntan dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka secara efektif dan etis (Albrecht dkk., 2012). Selain itu, IES telah terbukti meningkatkan kemampuan akuntan dalam menilai risiko kecurangan dalam melaksanakan tugas dan

dengan demikian dapat mengurangi potensi korupsi (Popoola dkk., 2015). Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini.

H<sub>1</sub>: Pengadopsian *International Education Standards* berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi suatu negara.

*International Standard on Auditing* (ISA) adalah seperangkat standar audit dikembangkan oleh IFAC yang menyediakan kerangka kerja bagi auditor dalam melakukan audit laporan keuangan, termasuk langkah-langkah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan suatu audit. Tujuan dari ISA adalah untuk meningkatkan kualitas, keandalan, dan transparansi pelaporan keuangan dengan memastikan bahwa audit dilakukan secara konsisten dan teliti. Mengingat bahwa peraturan akuntansi dan audit yang baik dapat memfasilitasi transparansi melalui pengungkapan informasi yang lebih baik. Studi Malagueño dkk., (2010) menemukan bahwa negara dapat mengurangi korupsi dengan meningkatkan transparansi pelaporan keuangan dengan meningkatkan standar akuntansi dan audit. Ionescu, (2017) menyimpulkan bahwa kecurangan dan birokrasi merupakan penyebab korupsi dan dapat diminimalkan dengan menerapkan standar akuntansi internasional, standar audit, dan prinsip kode etik. Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini.

H<sub>2</sub>: Pengadopsian *International Standards on Auditing* berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi suatu negara.

*Code of Ethics for Professional Accountants* (COE) adalah seperangkat prinsip dan nilai etis yang dikembangkan oleh IFAC. Kode ini bertujuan untuk mempromosikan integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan perilaku profesional di antara akuntan profesional serta menjaga kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi. Penelitian oleh Keskin & Işık (2015) menemukan bahwa organisasi akuntansi di negara-negara yang sangat korup lebih cenderung untuk tidak mengadopsi kode etik IFAC daripada di negara-negara yang kurang korup. Shanks (2020) menyimpulkan bahwa kode etik IESBA dapat membantu mencegah korupsi dengan melarang tindakan yang melanggar etika. Lee dkk. (2018) menyatakan bahwa IESBA melalui NOCLAR, yang merupakan bagian dari *Code of Ethics for Professional Accountants* dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di dalam profesi akuntansi. Ionescu (2017) menyimpulkan bahwa kecurangan dan birokrasi adalah penyebab korupsi dan dapat diminimalkan dengan menerapkan standar akuntansi internasional, standar audit internasional, dan mengikuti prinsip kode etik. Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini.



H<sub>3</sub>: Pengadopsian *Code of Ethics for Professional Accountants* berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi suatu negara.

*International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS) adalah seperangkat standar akuntansi yang dikembangkan oleh IFAC untuk pelaporan keuangan di sektor publik. IPSAS bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan transparansi pelaporan keuangan di sektor publik. Penelitian telah menunjukkan bahwa peraturan akuntansi dan audit yang baik, seperti IPSAS dapat membantu mengurangi korupsi. Tawiah (2021) menemukan bahwa penerapan standar akuntansi internasional berkualitas tinggi, seperti IPSAS, ISA, dan IFRS dapat secara efektif mengendalikan korupsi. Atuilik (2016) juga menemukan korelasi positif antara adopsi IPSAS dan tingkat korupsi yang lebih rendah. Dimana negara-negara yang telah mengadopsi IPSAS ditemukan memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah daripada yang tidak mengadopsi IPSAS. Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini.

H<sub>4</sub>: Pengadopsian *International Public Sector Accounting Standards* berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi suatu negara.

*International Financial Reporting Standards* (IFRS) adalah seperangkat standar akuntansi yang dikembangkan oleh IASB. IFRS bertujuan untuk meningkatkan transparansi, komparabilitas, dan konsistensi pelaporan keuangan. Penelitian telah menunjukkan bahwa adopsi IFRS dapat membantu mengurangi korupsi di negara-negara yang telah mengadopsinya, baik di negara maju maupun berkembang. Houqe & Monem (2016) menemukan bahwa tingkat adopsi dan pengungkapan IFRS dapat berdampak pada pengurangan korupsi. Tawiah (2021) menyimpulkan bahwa adopsi IFRS, bersama dengan IPSAS dan ISA, dapat membantu mengatasi masalah korupsi di suatu negara. Temuan Haapamäki (2019) juga mendukung hal ini, menunjukkan bahwa pengadopsian IFRS dan ISA memiliki hubungan positif dengan pengendalian korupsi. Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini.

H<sub>5</sub>: Pengadopsian *International Financial Reporting Standards* berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi suatu negara.

Menurut Hofstede dkk. (2010) *Power Distance* (PD) merujuk “pada tingkat dimana anggota masyarakat yang kurang berkuasa dapat menerima dan mengharapkan bahwa kekuasaan didistribusikan secara tidak merata”. Dalam masyarakat dengan budaya PD yang tinggi, individu cenderung tidak menentang otoritas dan aturan, yang dapat mengarah pada kondisi kurangnya *check and balances* dalam

penggunaan kekuasaan dan dapat menjadi faktor pendukung yang menyebabkan seseorang yang memiliki kekuasaan untuk memperkaya dirinya melalui tindakan ilegal (Hofstede, 1999; dan Husted, 1999). Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini.

H<sub>6</sub>: Dimensi budaya *Power Distance* berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi suatu negara.

Menurut Hofstede dkk. (2010) *Individualism* (IDV) merujuk pada "keputusan mengenai pandangan nilai hidup seseorang yang menempatkan individu di atas kelompok sosial". Skor tinggi pada dimensi ini (*individualism*) dicirikan dengan masyarakat dengan ikatan antar individu yang longgar/renggang, dimana setiap orang diharapkan untuk menjaga dirinya sendiri dan keluarga terdekatnya. Sedangkan *collectivism* (skor rendah pada *individualism*) sebagai kebalikannya dengan ciri masyarakat di mana orang-orang sejak lahir terintegrasi dalam kelompok-kelompok yang kuat dan kohesif, yang sepanjang hidupnya terus melindungi mereka dengan imbalan/pertukaran akan kesetiaan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Terkait dengan korupsi, Yamen dkk. (2019) dan Achim (2016) menjelaskan bahwa sikap kesetiaan tanpa ragu yang ditemukan dalam budaya *collectivism* dapat mendorong orang untuk melindungi kelompok mereka tanpa mempertimbangkan tindakan mereka, baik atau buruk. Selain itu, kasus korupsi yang sering terjadi juga lebih sulit dicegah ketika korupsi dilakukan secara kolektif (kolusi) daripada ketika dilakukan secara individual. Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini.

H<sub>7</sub>: Dimensi budaya *Individualism* berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi suatu negara.

Menurut Hofstede dkk. (2010) *Masculinity* merujuk pada "preferensi dalam masyarakat untuk pencapaian, kepahlawanan, ketegasan, dan imbalan material atas keberhasilan (*masculinity*) atau preferensi untuk kerjasama, kesederhanaan, peduli pada yang lemah, dan kualitas hidup (*femininity*)". Terkait dengan korupsi, Husted (1999) menjelaskan bahwa masyarakat yang dicirikan dengan *masculine* mendorong individu untuk ambisius dan kompetitif, dan berusaha untuk kesuksesan material dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada keterlibatan dalam perilaku tidak etis. Selain itu, karena tujuan akhir (*ultimate achievement*) lebih penting daripada bagaimana tujuan tersebut dicapai, seseorang mungkin merasa nyaman mengejar tujuannya dengan cara informal (suap), asalkan mereka melihat kemungkinan besar dalam mencapainya. Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini.

H<sub>8</sub>: Dimensi budaya *Masculinity* berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi suatu negara.



Menurut Hofstede dkk. (2010) *Uncertainty Avoidance* (UA) mengacu pada "derajat di mana anggota masyarakat merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian dan ambiguitas". Dalam budaya UA tinggi, orang dicirikan merasa nyaman jika keadaan saat ini dan masa depan mereka jelas. Mereka cenderung merasa cemas akan ketidakpastian kehidupan dan melihatnya sebagai sesuatu yang mengancam dan harus diatasi, di mana aturan cenderung banyak, eksplisit, dan tertulis dalam hukum dan regulasi. Sementara itu budaya dengan UA yang rendah akan merasa nyaman meskipun mereka tidak memiliki kepastian tentang saat ini atau masa depan. Sikap ini ditunjukkan oleh karakteristik masyarakat yang menerima bahwa kehidupan memang penuh ketidakpastian, dan cara untuk menghadapinya adalah dengan hidup di saat sekarang, di mana secara emosional, terdapat ketidaksukaan terhadap aturan formal karena orang berpikir bahwa masalah dapat diselesaikan tanpa aturan formal dan hanya dibuat dalam kasus-kasus yang mutlak diperlukan. Terkait dengan korupsi, banyaknya aturan dan regulasi yang kompleks pada budaya UA yang tinggi dapat menciptakan kesempatan untuk menghasilkan rente ekonomi yang dapat mengarah korupsi (Yeganeh, 2014). Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini.

H<sub>9</sub>: Dimensi budaya *Uncertainty Avoidance* berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi suatu negara.

Menurut Hofstede dkk. (2010) *Long-Term Orientation* (LTO) merujuk pada "bagaimana setiap masyarakat harus mempertahankan beberapa hubungan dengan masa lalunya sambil menghadapi tantangan masa kini dan masa depan". Masyarakat dengan skor tinggi pada dimensi ini lebih dinamis, berorientasi pada masa depan, dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Selain itu, orang-orang dengan budaya LTO dijelaskan memiliki nilai-nilai kerja seperti pembelajaran, kejujuran, adaptabilitas, tanggung jawab, dan disiplin. Sebaliknya, masyarakat dengan skor rendah pada dimensi ini (*Short-Term Orientation*/STO) dicirikan sebagai lebih statis, berorientasi pada masa lalu dan masa kini, atau berorientasi pada tradisi, di mana orang-orang mempertahankan dan menghormati tradisi dan norma yang ada sambil melihat perubahan sosial dengan penuh kecurigaan. Nilai-nilai utama dalam pekerjaan bagi orang-orang dengan budaya STO termasuk kebebasan, prestasi, dan berpikir sendiri. Terkait dengan korupsi, Yamen dkk. (2019) menjelaskan bahwa kecenderungan mendapatkan hasil cepat dalam masyarakat STO dapat mendorong orang melakukan kejahatan finansial, dan pada saat yang sama, juga mencegah mereka mempertimbangkan semua konsekuensi dari kejahatan tersebut. Sebaliknya, nilai kerja utama pada budaya LTO dapat membuat orang lebih mampu memprediksi risiko penipuan yang

mungkin terjadi di masa depan dan lebih siap untuk merespons risiko penipuan secara proaktif (Amalia & Handayani, 2019). Oleh karena itu, kami mengusulkan hipotesis berikut:

H<sub>10</sub>: Dimensi budaya *Long-Term Orientation* berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi suatu negara.

Hofstede dkk. (2010) menggunakan dimensi ini (IVR) terkait budaya *indulgence* sebagai kebalikan dari *restraint*. Skor tinggi pada dimensi ini (*indulgence*) menunjukkan masyarakat yang memperbolehkan pemenuhan kebutuhan dasar dan naluri manusia yang berkaitan dengan menikmati hidup dan bersenang-senang secara relatif bebas. Adapun skor rendah pada dimensi ini (*restraint*) menunjukkan masyarakat yang menekan pemenuhan kebutuhan dan mengatur dengan norma-norma sosial yang ketat. Terkait korupsi, Boateng dkk. (2021) menjelaskan bahwa karakteristik masyarakat dengan nilai rendah pada *indulgence (restraint)* dapat membatasi kemampuan individu untuk mempertanyakan perilaku yang tidak etis, dapat memfasilitasi terjadinya tindakan korupsi. Sedangkan menurut Amalia & Handayani (2019), memiliki sikap optimis dan cara berpikir yang positif di masyarakat dengan budaya *indulgence* dapat mengurangi kecurangan. Oleh karena itu, kami mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>11</sub>: Dimensi budaya *Indulgence* berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi suatu negara.

## B. METODOLOGI

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari pemeringkatan tingkat korupsi dari *Transparency International* yang dapat diakses melalui <https://www.transparency.org/>, dimensi budaya yang diperoleh dari *website* Hofstede yang dapat diakses melalui <https://www.hofstede-insights.com/>, dan pengadopsian standar akuntansi internasional yang dapat diakses melalui *website International Federation of Accountants* yang dapat diakses melalui <https://www.ifac.org/>. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Adapun analisis data terdiri dari analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda. Adapun persamaan regresi yang dipakai adalah sebagai berikut:

$$\text{CPI} = \alpha + \beta_1(\text{IES}) + \beta_2(\text{ISA}) + \beta_3(\text{COE}) + \beta_4(\text{IPSAS}) + \beta_5(\text{IFRS}) + \beta_6(\text{PD}) + \beta_7(\text{IDV}) + \beta_8(\text{MAS}) \\ + \beta_9(\text{UA}) + \beta_{10}(\text{LTO}) + \beta_{11}(\text{IVR}) + \varepsilon$$

dimana,

CPI = *Corruption Perception Index*.

- IES = *International Education Standards*.  
ISA = *International Standards on Auditing*.  
COE = *Adoption of the Code of Ethics for Professional Accountants*.  
IPSAS = *International Public Sector Accounting Standards*.  
IFRS = *International Financial Reporting Standards*.  
PD = *Power Distance*.  
IDV = *Individualism*.  
MAS = *Masculinity*.  
UA = *Uncertainty Avoidance*.  
LTO = *Long-Term Orientation*.  
IVR = *Indulgence*.  
 $\alpha$  = *Constant*.  
 $\beta_x$  = Koefisien Regresi Variabel Independen.  
 $\varepsilon$  = Faktor pengganggu atau error.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi dalam penelitian ini adalah negara-negara di seluruh negara di dunia yang mendapatkan pengakuan dari *United Nations* pada tahun 2022, yang terdiri dari 193 negara. Berdasarkan populasi tersebut, kemudian ditentukan sampel penelitian dengan metode *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Tabel 1 menyediakan rincian lebih lanjut mengenai proses pemilihan sampel.

**Tabel 1. Ringkasan Metode Penentuan Sampel Penelitian**

Keterangan	Jumlah Negara
<b>Populasi</b>	
Jumlah negara-negara yang mendapatkan pengakuan dari <i>United Nations</i> pada tahun 2021	193
<b>Kriteria 1</b>	
Negara yang tidak memperoleh peringkat dan skor dari <i>Transparency International</i> untuk tahun 2022.	(17)
<b>Kriteria 2</b>	
Negara yang tidak memiliki data terkait pengadopsian standar internasional oleh <i>International Federation of Accountants</i> dan <i>International Accounting Standards Board</i> .	(47)
<b>Kriteria 3</b>	(46)

Negara yang tidak memiliki data terkait dimensi budaya yang dikeluarkan oleh Hofstede

**Jumlah negara yang memenuhi kriteria/Jumlah Sampel Penelitian** 83

Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan tujuan agar lebih mempermudah dalam melihat variabel yang akan diteliti. Statistik deskriptif terdiri atas nilai maksimum, minimum, mean atau rerata, median dan deviasi standar dari setiap variabel. Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 2.

**Table 2. Analisis Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CPI	83	10,00	77,00	48,9518	18,90664
IES	83	1,00	3,00	2,2892	0,50679
ISA	83	2,00	3,00	2,6265	0,48667
COE	83	1,00	3,00	2,3012	0,55732
IPSAS	83	1,00	3,00	1,6988	0,63888
IFRS	83	1,00	3,00	2,4578	0,54775
PD	83	11,00	100,00	63,7590	21,06123
IDV	83	10,00	91,00	41,7590	22,55324
MAS	83	5,00	100,00	48,2289	17,59665
UA	83	8,00	100,00	67,0602	21,83326
LTO	83	4,00	100,00	47,6024	22,99679
IVR	83	,00	97,00	43,9518	22,43739

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data yang digunakan dalam penelitian terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov dengan melihat nilai *asymptomatic significant*. Berdasarkan tabel 3 menunjukkan nilai Asymp. Sig lebih besar dari  $\alpha$  (0,05), menunjukkan data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

**Table 3. Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov**

		Unstandardized Residual
N		83
Normal	Mean	,0000000
Parameters <sup>a,b</sup>	Std. Deviation	9,40942040
Most	Absolute	,057
Extreme	Positive	,047
Differences	Negative	-,057
Test Statistic		,057
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Berdasarkan tabel 4 menunjukkan nilai *tolerance* semua variabel independen lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, menunjukkan data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat masalah atau gejala multikolinearitas.

**Table 4. Uji Multikolinearitas**

Variable	Tolerance	VIF
IES	0,768	1,302
ISA	0,608	1,646
COE	0,690	1,449
IPSAS	0,877	1,140
IFRS	0,587	1,704
PD	0,368	2,717
IDV	0,424	2,360
MAS	0,850	1,176
UA	0,751	1,332
LTO	0,670	1,492
IVR	0,656	1,524

a. Dependent Variable: CPI

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji glejser dengan melihat nilai *significant* semua variabel independen terhadap nilai absolute residual (ABS\_RES). Berdasarkan tabel 5 menunjukkan nilai *significant* semua variabel independen lebih besar dari 0,05 menunjukkan data dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Table 5. Uji Glejser**

	Sig.
(Constant)	0,256
IES	0,256
ISA	0,578
COE	0,941
IPSAS	0,758
IFRS	0,821
PD	0,619

IDV	0,755
MAS	0,539
UA	0,243
LTO	0,609
IVR	0,707

a. Dependent Variable: ABS\_RES

**Table 6. Uji Analisis Linear Berganda**

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	58,689	13,659		4,297	0,000
IES	1,574	2,514	0,042	0,626	0,533
ISA	2,783	2,944	0,072	0,945	0,348
COE	-2,648	2,412	-0,078	-1,098	0,276
IPSAS	-3,776	1,866	-0,128	-2,023	0,047
IFRS	-5,519	2,661	-0,160	-2,074	0,042
PD	0,302	0,087	0,337	3,460	0,001
IDV	-0,245	0,076	-0,292	-3,220	0,002
MAS	0,157	0,069	0,146	2,275	0,026
UA	0,129	0,059	0,149	2,180	0,033
LTO	-0,271	0,059	-0,329	-4,563	0,000
IVR	-0,158	0,061	-0,187	-2,565	0,012

a. Dependent Variable: CPI

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model regresi analisis linear berganda. Berdasarkan Tabel 6, persamaan regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{CPI} = 58,689 + 1,574 \text{ IES} + 2,783 \text{ ISA} + -2,648 \text{ COE} + -3,776 \text{ IPSAS} + -5,519 \text{ IFRS} \\ + 0,302 \text{ PD} + -0,245 + 0,157 \text{ MAS} + 0,129 \text{ UA} + -0,271 \text{ LTO} + -0,158 \text{ IVR}$$

Nilai koefisien positif pada variabel IES, ISA, PD, MAS, dan UA menunjukkan bahwa setiap perubahan pada variabel-variabel tersebut akan direspons secara positif oleh CPI. Jika variabel-variabel tersebut meningkat, maka CPI juga akan meningkat, dan sebaliknya. Sementara itu, variabel COE, IPSAS, IFRS, IDV, LTO, dan IVR memiliki nilai koefisien negatif menunjukkan bahwa setiap perubahan pada variabel-variabel tersebut akan direspons secara negatif oleh CPI. Jika variabel-variabel tersebut meningkat, maka CPI akan menurun. Sebaliknya, jika variabel-variabel tersebut menurun, maka CPI akan meningkat.



Terdapat sebelas hipotesis yang uji dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas untuk variabel IPSAS, IFRS, PD, IDV, MAS, UA, LTO dan IVR lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05) signifikan kurang dari  $\alpha$  (0,05) dan nilai t lebih tinggi dari t tabel 1,9944 (df = 83-12-1=70). Sedangkan tiga variabel independen lainnya memiliki nilai probabilitas signifikan lebih tinggi dari  $\alpha$  (0,05) dan nilai t lebih kecil dari t tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H<sub>4</sub>, H<sub>5</sub>, H<sub>6</sub>, H<sub>7</sub>, H<sub>8</sub>, H<sub>9</sub>, H<sub>10</sub>, dan H<sub>11</sub> diterima, sementara H<sub>1</sub>, H<sub>2</sub>, dan H<sub>3</sub> ditolak.

**Tabel 7 Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

<b>Model Summary</b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,867 <sup>a</sup>	,752	,714	10,11208

a. Predictors: (Constant), IVR, MAS, COE, IPSAS, UA, LTO, ISA, IES, PD, IFRS, IDV

Berdasarkan tabel 7 nilai adjusted R<sup>2</sup> penelitian ini sebesar 0,714, yang berarti variabel independen dalam penelitian ini dapat menjelaskan 71,4% variasi dalam CPI. Namun, 28,6% sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

### **Pengadopsian Standar Akuntansi Internasional dan Korupsi**

Penerimaan hipotesis yang menunjukkan variabel IPSAS (H<sub>4</sub>) dan IFRS (H<sub>5</sub>) berpengaruh negatif terhadap CPI. Hasil tersebut dari perspektif *fraud triangle* mendukung pernyataan bahwa penggunaan akuntansi dapat membantu mengurangi faktor *opportunity* yang mendorong seseorang untuk melakukan korupsi dengan meningkatkan kontrol internal dan efektivitas audit (Cressey, 1986). Serta dari perspektif teori agensi mendukung pernyataan bahwa akuntansi melalui standar akuntansi dan audit dapat membantu mengatasi masalah prinsipal-agen dan asimetri informasi yang dapat menyebabkan tindakan korupsi (Malagueño dkk., 2010 dan Wu, 2005). Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Tawiah (2021) yang menemukan pengadopsian IPSAS, IFRS, dan ISA berpengaruh negatif terhadap korupsi. Penelitian Atuilik (2016) yang menemukan korelasi positif antara adopsi IPSAS dan tingkat korupsi yang lebih rendah. Houqe & Monem (2016) menjelaskan pengadopsian IFRS dan tingkat pengungkapan berpengaruh dan dapat mengurangi tingkat korupsi di negara maju dan berkembang. Serta mendukung penelitian yang menjelaskan bahwa pengadopsian standar akuntansi internasional yang berkualitas tinggi oleh suatu negara dapat mengurangi dan mencegah korupsi melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, mengurangi asimetri informasi, dan memastikan praktik berkualitas tinggi oleh akuntan (Chen dkk., 2010; Ghaffoori, 2016; Sutcliffe, 2003; dan Wu, 2005).

Adapun untuk penolakan hipotesis yang menunjukkan variabel IES (H<sub>1</sub>), ISA (H<sub>2</sub>), dan COE (H<sub>3</sub>) tidak berpengaruh terhadap CPI tidak sesuai dengan hipotesis awal dalam penelitian ini. Lebih lanjut penolakan hipotesis pertama, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Albrecht dkk. (2012) yang menjelaskan bahwa rendahnya kompetensi profesional merupakan salah satu masalah yang berkontribusi terhadap kegagalan etika dan intelektual pada profesi akuntan termasuk auditor dan menemukan keputusan suatu negara dalam menerapkan syarat kompetensi (formal atau informal) seperti IES bagi profesi akuntan dan auditor terkait dengan persepsi korupsi yang lebih rendah jika dibandingkan negara yang tidak menerapkan syarat kompetensi. Serta penelitian Popoola dkk. (2015) yang menemukan *knowledge requirement* dapat meningkatkan kemampuan akuntan forensik dan auditor dalam menilai risiko kecurangan/*fraud*. Sementara untuk penolakan hipotesis ke dua, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Malagueño dkk., (2010), yang menemukan bahwa negara dapat menurunkan tingkat korupsi dengan meningkatkan transparansi pelaporan keuangan melalui peningkatan standar akuntansi dan audit. Haapamäki (2019) menyimpulkan pengadopsian ISA berhubungan positif dengan pengendalian korupsi. Sedangkan penolakan hipotesis ketiga, tidak sejalan dengan penelitian Lee dkk. (2018) yang menjelaskan bahwa IESBA melalui NOCLAR yang merupakan bagian dari *Code of Ethics for Professional Accountants* dapat meningkatkan dan memfasilitasi pengembangan akuntabilitas dan transparansi bagi profesi akuntan. Keskin & Işık (2015) yang menemukan bahwa organisasi akuntansi nasional di negara-negara yang sangat korup akan cenderung tidak mengadopsi kode etik IFAC daripada di negara-negara yang sangat bersih dari korupsi.

### **Dimensi Budaya dan Korupsi**

Penerimaan hipotesis yang menunjukkan variabel PD (H<sub>6</sub>), MAS (H<sub>8</sub>), dan UA (H<sub>9</sub>) berpengaruh positif dan variabel IDV (H<sub>7</sub>), LTO (H<sub>10</sub>), dan IVR (H<sub>11</sub>) berpengaruh negatif terhadap korupsi sesuai dengan hipotesis awal dalam penelitian ini. Dari perspektif *fraud triangle*, hasil tersebut menunjukkan suatu budaya dalam masyarakat dapat memengaruhi kecenderungan/keputusan seseorang untuk melakukan/tidak melakukan suatu tindakan korupsi atau menoleransi suatu tindakan korupsi (Amalia & Handayani, 2019 dan Mihret, 2014). Sedangkan dari perspektif teori agensi hasil penelitian tersebut menunjukkan suatu budaya tertentu dapat memengaruhi hubungan yang terjadi antara prinsipal dan agen di mana suatu budaya mungkin dapat menyebabkan asimetri informasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan budaya yang lain. (Ekanayake, 2004; Farooq dkk., 2020; dan Wiseman dkk., 2012).

Penerimaan hipotesis keenam konsisten dengan hasil penelitian Yeganeh (2014) dan Davis & Ruhe (2003) yang menemukan nilai budaya PD yang tinggi berkaitan dengan tingkat korupsi yang tinggi pada suatu negara. Tanzi (1998) dan Mihret (2014) yang menemukan negara dengan PD yang tinggi memiliki risiko lebih tinggi terhadap *fraud*. Namun penerimaan hipotesis ke enam bertentangan dengan hasil penelitian Seleim dan Seleim & Bontis (2009) yang menemukan budaya PD tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi suatu negara.

Penerimaan hipotesis ketujuh konsisten dengan hasil penelitian Huber (2001) yang menemukan semakin tinggi nilai pada indeks IDV maka semakin rendah tingkat korupsi pada suatu negara. Penelitian Achim (2016) menunjukkan hasil bahwa semakin rendah skor IDV suatu masyarakat, semakin tinggi tingkat korupsinya. Sebaliknya penerimaan hipotesis ke enam bertentangan dengan hasil penelitian Seleim & Bontis (2009) dan Mihret (2014) yang menemukan IDV tidak berpengaruh terhadap korupsi.

Penerimaan hipotesis kedelapan konsisten dengan hasil penelitian Yeganeh (2014) menemukan nilai budaya MAS yang tinggi pada suatu negara berkaitan dengan tingkat korupsi yang tinggi. Yamen dkk. (2019) menyimpulkan bahwa kejahatan keuangan (*financial crime*) meningkat pada negara dengan MAS yang tinggi. Sebaliknya penerimaan hipotesis kedelapan bertentangan dengan hasil penelitian Mihret (2014) yang menemukan dimensi MAS tidak berpengaruh terhadap risiko *fraud*. Serta penelitian Amalia & Handayani (2019) yang menemukan MAS tidak berpengaruh terhadap risiko *fraud*.

Penerimaan hipotesis kesembilan konsisten dengan hasil penelitian Huber (2001) yang menunjukkan skor tinggi pada UA terkait dengan skor rendah pada *CPI* (korupsi yang tinggi). Yeganeh (2014) menemukan dimensi budaya UA berpengaruh positif dan identik dengan perilaku korupsi. Namun penerimaan hipotesis kesembilan bertentangan dengan hasil penelitian Achim (2016) dan Boateng dkk. (2021) yang menemukan UA tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi.

Penerimaan hipotesis kesepuluh konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan Achim (2016) menunjukkan hasil bahwa semakin tinggi skor LTO suatu masyarakat, semakin rendah tingkat korupsinya. Mihret (2014) yang menemukan dimensi LTO berpengaruh negatif terhadap korupsi. Meskipun demikian penerimaan hipotesis kesepuluh bertentangan dengan hasil penelitian Seleim & Bonti (2009) yang menemukan nilai tinggi pada budaya LTO, memiliki nilai yang rendah pada *CPI (High Corruption)*.

Penerimaan hipotesis kesebelas konsisten dengan hasil penelitian Zuzana & Duzan (2018) dan Boateng dkk. (2021) menemukan skor tinggi pada budaya *indulgence* berpengaruh negatif terhadap

tingkat korupsi pada suatu negara. Sebaliknya hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Achim (2016) yang menemukan *indulgence* tidak berpengaruh terhadap CPI. Serta penelitian Yamen dkk. (2019) yang menemukan *indulgence* tidak berpengaruh terhadap kejahatan keuangan.

#### **D. SIMPULAN**

Penelitian ini memberikan bukti hubungan yang signifikan adopsi standar akuntansi internasional dan dimensi budaya dengan tingkat korupsi suatu negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara yang memiliki karakteristik budaya *power distance* yang tinggi, maskulinitas yang tinggi, individualism yang rendah, *long-term orientation*, dan *indulgence* berpengaruh positif dengan tingkat korupsi yang tinggi, sedangkan adopsi IPSAS dan IFRS berhubungan negatif dengan persepsi korupsi. Hasil ini memberikan implikasi bagi pengembangan strategi dan kebijakan dalam usaha mengurangi praktik korupsi. Pemerintah dan pemangku kepentingan dapat menggunakan temuan ini dalam memilih standar akuntansi internasional yang tepat dan mengadopsi pendekatan holistik yang mempertimbangkan variabel budaya. Namun penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama dalam periode variabel yang digunakan terkhusus untuk pengadopsian standar akuntansi internasional yang sangat bergantung pada kepatuhan suatu negara dalam pemenuhan *Statements of Member Obligations* (SMO). Penelitian mendatang dapat meningkatkan reliabilitas hasil penelitian dengan meningkatkan periode analisis dan mengendalikan *lagged effects* dari adopsi standar akuntansi internasional.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- ACFE. (2022). Occupational Fraud 2022: A Report to the nations. *Association of Certified Fraud Examiners*, 1–96.
- Achim, M. V. (2016). Cultural Dimension of Corruption: A Cross-Country Survey. *International Advances in Economic Research*, 22(3), 333–345.
- Albrecht, C., Malagueno, R., Holland, D., & Sanders, M. (2012). A Cross-Country Perspective on Professional Oversight, Education Standards and Countries' Perceived Level of Corruption. *Cross Cultural Management: An International Journal*, 19(4), 433–454.
- Amalia, N., & Handayani, R. S. (2019). Budaya Nasional Dan Risiko Fraud. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 9(3), 360–374.
- Atuilik, W. A. (2016). The Relationship between the Adoption of International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) by Governments and Perceived Levels of Corruption. *International Journal of Current Research*, 8(5), 32052–32070.
- Boateng, A., Wang, Y., Ntim, C., & Glaister, K. W. (2021). National Culture, Corporate Governance and Corruption: A Cross-Country Analysis. *International Journal of Finance and Economics*, 26(3), 3852–3874.
- Chen, H., Tang, Q., Jiang, Y., & Lin, Z. (2010). The Role of International Financial Reporting Standards in

- Accounting Quality: Evidence from the European Union. *Journal of International Financial Management and Accounting*, 21(3), 220–278.
- Cressey, D. R. (1950). The Criminal Violation of Financial Trust. *American Sociological Review*, 15(6), 738–743.
- Cressey, D. R. (1986). Why Managers Commit Fraud. *Australian & New Zealand Journal of Criminology*, 19(4), 195–209.
- Davis, J. H., & Ruhe, J. A. (2003). Perceptions Of Country Corruption: Antecedents an Outcomes. *Journal of Business Ethicsthics*, 43(4), 275–288.
- Davis, J. S., & Pesch, H. L. (2013). Fraud Dynamics and Controls in Organizations. *Accounting, Organizations and Society*, 38(6–7), 469–483.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An Assessment and Review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74.
- Ekanayake, S. (2004). Agency Theory, National Culture, and Management Control Systems. *Journal of American Academy of Business*, 4(1/2), 49–54.
- Everett, J., Neu, D., & Rahaman, A. S. (2007). Accounting and the Global Fight Against Corruption. *Accounting, Organizations and Society*, 32(6), 513–542.
- Farooq, U., Ahmed, J., Ashfaq, K., Khan, G. ul H., & Khan, S. (2020). National Culture and Firm Financial Performance: A Mediating Role of Firm Financing Decision. *Cogent Business and Management*, 7(1), 1–21.
- Ghaffoori, A. (2016). The Role of Accounting Reform in Detering Corruption Practices in the Public Sector: A Case Study in Kurdistan Region. *Journal of Business & Financial Affairs*, 5(4), 1–15.
- Gray, R., Bebbington, J., & McPhail, K. (1994). Teaching Ethics in Accounting and the Ethics of Accounting Teaching: Educating for Immorality and A Possible Case for Social and Environmental Accounting Education. *Accounting Education*, 3(1), 51–75.
- Gupta, S., Davoodi, H., & Alonso-Terme, R. (2002). Does Corruption Affect Income Inequality and Poverty. *Economics of Governance*, 3, 23–45.
- Haapamäki, E. (2019). The Role of Country-Specific Factors and the Adoption of a Global Business Language. *Nordic Journal of Business*, 68(1), 34–52.
- Hofstede, G. (1999). Problems Remain, But Theories Will Change: The Universal and the Specific in 21st-Century Global Management. *Organizational Dynamics*, 28(1), 34–44.
- Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). *Cultures and Organizations: Software of the Mind: Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival* (3rd ed). New York, NY: McGraw-Hill.
- Houqe, M. N., & Monem, R. M. (2016). IFRS Adoption, Extent of Disclosure, and Perceived Corruption: A Cross-Country Study. *International Journal of Accounting*, 51(3), 363–378.
- Huber, W. D. (2001). Culture and Corruption: Using Hofstede’s Cultural Dimensions to Explain Perceptions of Corruption. *SSRN Electronic Journal*, 1–27.
- Husted, B. W. (1999). Wealth, Culture, and Corruption. *Journal of International Business Studies*, 30(2), 339–359.
- Ionescu, L. (2017). Errors dan Fraud in Accounting: The Role Of External Audit In Fighting Corruption. *Annals of Spiru Haret University, Economic Series*, 17(4), 29–36.

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Keskin, A. İ., & Işık, E. Y. (2015). An Analysis of the Relationship Between IFAC Code of Ethics and CPI. *Emerging Markets Journal*, 5(2), 41–48.
- Kimbro, M. B. (2002). A Cross-Country Empirical Investigation of Corruption and Its Relationship to Economic, Cultural, and Monitoring Institutions: An Examination of the Role of Accounting and Financial Statements Quality.
- Lee, G., Pittroff, E., & Turner, M. J. (2018). Is A Uniform Approach to Whistle-Blowing Regulation Effective? Evidence From the United States and Germany. *Journal of Business Ethics*, 163(3), 553–576.
- Malagueño, R., Chad O, A., Ainge, C., & Stephens, N. M. (2010). Accounting and Corruption : *Journal of Money Laundering Control*, 13(4), 372–393.
- Mauro, P. (1996). The Effects of Corruption on Growth, Investment, and Government Expenditure. In *IMF Working Papers* (No. WP/96/98).
- Mihret, D. G. (2014). National Culture and Fraud Risk: Exploratory Evidence. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 12(2), 161–176.
- Popoola, O. M. J., Che-Ahmad, A. B., & Samsudin, R. S. (2015). An Empirical Investigation of Fraud Risk Assessment and Knowledge Requirement on Fraud Related Problem Representation in Nigeria. *Accounting Research Journal*, 28(1), 78–97.
- Seleim, A., & Bontis, N. (2009). The Relationship Between Culture and Corruption: A Cross-National Study. *Journal of Intellectual Capital*, 10(1), 165–184.
- Shanks, R. (2020). *Is The IESBA Code of Ethics Sufficient to Help Solve Ethical Dilemmas Facing The Accounting Profession?* London.
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1993). Corruption. *The Quarterly Journal of Economics*, 108(3), 599–617.
- Sutcliffe, P. (2003). The Standards Programme of IFAC's Public Sector Committee. *Public Money and Management*, 23(1), 29–36.
- Tanzi, V. (1998). Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope, and Cures. In *IMF Working Papers* (No. WP/98/63).
- Tawiah, V. (2021). The Impact of IPSAS Adoption on Corruption in Developing Countries. *Financial Accountability and Management*, 39(1), 1–22.
- Transparency International. (2022). Corruption Perceptions Index 2022. Diambil 20 Maret 2023, dari <https://www.transparency.org/en/cpi/2022>
- Wiseman, R. M., Cuevas-Rodríguez, G., & Gomez-Mejia, L. R. (2012). Towards a social theory of agency. *Journal of Management Studies*, 49(1), 202–222.
- Wu, X. (2005). Firm Accounting Practices, Accounting Reform and Corruption in Asia. *Policy and Society*, 24(3), 53–78.
- Yamen, A., AlQudah, A., Badawi, A., & Bani-Mustafa, A. (2019). The Impact of National Culture on Financial Crime. *Journal of Money Laundering Control*, 22(2), 373–387.
- Yeganeh, H. (2014). Culture and Corruption: A Concurrent Application of Hofstede's, Schwartz's and Inglehart's



Frameworks. *International Journal of Development Issues*, 13(1), 2–24.

Zuzana, K., & Duzan, S. (2018). Influence of Culture on Corruption within the OECD Countries. *Journal of Interdisciplinary Research*, 8(1), 121–126.